

**SISTEM POLITIK TRADISIONAL MASYARAKAT SASAK
DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT POLITIK**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Filsafat Islam

Oleh:

JHONI SUTANGGA

NIM. 08510014

**JURUSAN FILSAFAT AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jhoni Sutangga
NIM : 08510014
Jurusan : Filsafat Agama

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 24 Januari 2014



KELAYAKAN SKRIPSI

Dosen. Dr. Mutiullah, S.Fil.I., M.Hum

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

=====

NOTA DINAS

Hal : Skripsi sdr. Jhoni Sutangga

Lamp : 6 eksemplar

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, menilai, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara ;

Nama : Jhoni Sutangga

NIM : 08510014

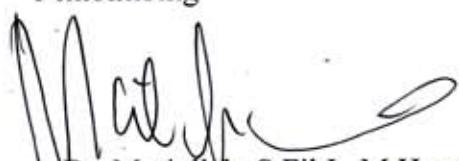
Judul Skripsi : SISTEM POLITIK TRADISIONAL MASYARAKAT SASAK
DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT POLITIK

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana starata satu dalam Jurusan / Prodi Filsafat Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 14 Januari 2014
Pembimbing



Dr. Mutiullah, S.Fil.I., M.Hum
NIP. 19791213 200604 1 005

P E N G E S A H A N

Nomor : UIN.02/DU/PP.00.9/191/2014

Skripsi / Tugas Akhir dengan judul : *SISTEM POLITIK TRADISIONAL MASYARAKAT SASAK DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT POLITIK*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Jhoni Sutangga
NIM : 08510014

Telah dimunaqosahkan pada : Kamis, tanggal: 23 Januari 2014

dengan nilai : 89 / A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PANITIA UJIAN MUNAQOSAH**Ketua Sidang/Penguji I**

Dr. Mutiullah, S.Fil.I, M.Hum
NIP. 19791213 200604 1 005

Penguji II
Iham Iqbal, S.Fil.I, M.Si
NIP. 19780629 200801 1 003**Penguji III**
Drs. H. Abdul Basir Solissa, M.Ag
NIP. 19561215 198803 1 001

Yogyakarta, 23 Januari 2014

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

D E K A N



Dr. Syaiful Nur, MA

NIP: 19620718 198803 1 005

MOTTO

“ Sebaik-baik manusia adalah
mereka yang bermanfaat untuk diri dan orang lain”.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Tanah Air



ABSTRAK

Jhoni Sutangga. Sistem Politik Tradisional Masyarakat Sasak (Perspektif Filsafat Politik). Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 2014.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena konstelasi politik dari golongan bangsawan “Menak” dan Tuan Guru di lembaga legislatif dan Kepala Daerah di gumi Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB). Kehadiran *Menak* Sasak merupakan representasi atas golongan aristokrasi yang mengaktualisasi sikap politik kekuasaan yang bersandarkan pada peta *genealogis*. Sistem kekuasaan dan prestise seringkali menghubungkan atau menyusun silsilah dirinya dengan kerajaan pada masa lampau yang pernah memerintah negeri atau suku bangsa-nya dan terkadang membuat silsilah keturunan yang bersifat “khayali”. Untuk membentuk struktur kekuasaan/politik orang Sasak sendiri telah memasukkan sebuah ideologi yang berperan untuk menjadi semacam kekuatan sebagai perekat yang akan mengikat berbagai kelas dan strata yang berbeda. Hal itu dibangun melalui ruang-ruang budaya seperti lembaga-lembaga adat yang dibangun serta terlegitimasi merupakan ruang agung untuk menjalin konspirasi politik kekuasaan.

Begitu juga dengan Tuan Guru adalah representasi dari komunitas pesantren. Bagi Tuan Guru jalur politik merupakan sarana untuk mendapatkan kembali hak-hak rakyat yang selama ini tidak tersentuh terutama dalam lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Selain itu kehadiran Tuan Guru adalah bagian dari cerminan kepemimpinan yang telah dicontohkan Nabi Muhammad di Madinah. Artinya, nabi mencerminkan konsep politik dalam Islam. Politik tidak lepas dari kekuasaan yang terlembaga dan Tuan Guru merupakan guru agama Islam yang sangat mulia dihadapan masyarakat Sasak. Golongan Tuan Guru dibentuk oleh proses sosial karena pengaruhnya yang demikian kuat dalam ruang budaya atau karena kecanggihannya “memainkan” eksotisme sejarah dan mengeksplorasi simbol-simbol budaya untuk mengaktualisasi eksistensinya. Dengan demikian kelompok santri (Tuan Guru) merupakan kelompok dapat terbentuk dan dibentuk kapanpun. Konsep tersebut sejatinya menimbulkan polemik yang kontradiktif antara aktor kekuasaan dan aktor religius. Dari hal diatas memunculkan stigma dikalangan masyarakat Sasak bahwa golongan *Menak* Sasak dan Tuan Guru merupakan kelompok elit Sasak. *Menak* Sasak sebagai elit budaya dan Tuan Guru sebagai elit agama.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem politik masyarakat Sasak di pulau Lombok yang terlembagakan secara sistemik dan tata nilai sistem Politik Masyarakat Sasak dalam Perspektif filsafat politik. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan jenis pendekatan sosial-filosofis dengan metode kualitatif: pengumpulan data, pengolahan data dan interpretasi data.

Legitimasi elit *menak* Sasak terlihat pada rekaya konstruksi sosial-historis yang dibangun dan sisi aristokrasi feodalistik yang menimbulkan pengakuan diri menjadi golongan atas dalam stratifikasi sosial. Sedangkan Tuan Guru tercermin pada kontruksi agama yang dijadikan sebagai perwujudan terhadap masyarakat Sasak. Besarnya pengaruh yang dibuat pada ruang agama-agama mencerminka sisi penting sosok elit kharismatik dikalangan masyarakat awam. Dari konsep itu maka pada dasarnya sistem politik yang ada pada kelompok-kelompok itu mencerminkan 1. politik identitas, yaitu kekuatan etnisitas yang dibangun 2. politik dinasti, yaitu aktualisasi politik kekerabatan dan krooniisme dan 3. politik irasional adalah politik tidak sehat dengan menggunakan cara lama (tradisional) yang tertuang dalam sistem kepemerintahan kekinian. Bagi Weber birokrasi ideal adalah bukan bertumpu pada kultur semata, tetapi juga bertumpu pada profesionalisme birokrasi terutama pada aparatur birokrasinya. Sehingga, hal ini mewujudkan birokrasi legal-rasional.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrohim

Puji Syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah swt. Karena berkah-Nya-lah Skripsi ini bisa selesai dengan baik walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu eksis membantu perjuangan beliau dalam menegakkan *Dinullah* di muka bumi ini.

Begitu banyak dukungan dan perhatian yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini, sehingga hambatan yang ada dapat dilalui dan dihadapi dengan penuh rasa sabar. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. H. Musa Asy'ari.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Dr. Syaifan Nur, M.A. Terima kasih atas kemudahan dan keikhlasan Bapak membimbing penulis selama masa perkuliahan.
3. Dr. M. Zuhri, M. Ag Ketua Jurusan Filsafat Agama.
4. Dr. Facrudin Fa'iz., S. Ag., M.Ag Ketua Jurusan Filsafat Agama demisionair. Dr. Alim Ruswantoro MA. selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih atas kerjasamanya dalam memberikan masukan serta solusi akademik selama saya menjalani kuliah dan terimakasih juga atas saran serta dukungan terhadap skripsi ini.
5. Dr. Mutiullah S. Fil.i., M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih atas kesetiaan dan antusiasnya dalam membimbing proses penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen, karyawan dan karyawati dan seluruh civitas akademika di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
7. Kepada Kedua orang tua yang tersayang, *Inaq* Idham dan H. Abd. Wa'ad. Terima kasih atas keikhlasanmu dalam do'a dan usaha untuk membiayai ananda selama kuliah. Do'a dan bakti, ananda curahkan sampai mati. Saya menyayangimu *Inaq*, *Bapak*.
8. Kepada *Semeton-semeton* ku, Idham Khalid dan Istrinya, Ahmad Dahlan dan Istrinya dan kanda tersayang *Inaq* Riana (Nurinsih) dan suaminya. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan serta bantuanmu sekalian baik materi dan jasa selama adinda kuliah, meski suaktu-waktu kalian bersikap pelit, penuh perhitungan atau mungkin sedang tidak ada adinda menyayangimu.
9. Kepada Keponaanku semua, Dewi Eva Orsa Putri, Ahmad Salda Iwintara, Danil Febrian Saputra, Mei Kartika Mutiara, Nirwana Apria Ningsih, dan Erni Ayuningsih. Senyum dan nakalmu selalu paman ingat. Jangan lupa rajin belajar kalian adalah generasi penerus bangsa.
10. Kepada keluarga besarku dari pihak *Inaq* (*Pepuq Aris*) dan pihak bapak (*Pepuk Indri*). Terimakasih atas do'a dan dukunganmu selama ananda kuliah. Kepada semeton-semeton yang lain.
11. Kepada adinda tersayang Juniatun Hasanah Amd., Keb. Terimakasih atas kesetiaanmu dalam menemani hidupku dan atas setiap saran-saranmu dalam skripsi ini. Sikap dan sifatmu yang unik dan terkadang menjengkelkan membuatku selalu kangen.
12. Kepada *Semeton-Semeton* dan Sahabat-sahabat sehati dan seperjuangan Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa (IKPM-Tastura) Lombok Tengah dan PMII Rayon Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Terima kasih atas proses

bersamanya untuk belajar hidup yang lebih dewasa dan progressif. Kepada *Semeton-semeton* IKADM dan komunitas-komunitas yang lain. Terimakasih dan mari berproses bersama.

13. Teman-teman Bejad's *Community* 2008: Muhammad Arif, Amri, Muhammad Mahrus, Darussalam, Rosyid (pak yayi), Irul, Moh. Fatoni, Junaidi, Nazwar, Azy, Acing, Alim (Alm), Shohib, Lion, Roni, Andi, Irul, Ulil, Ghafur, Iddin. Terima kasih selama ini saya banyak berhutang budi sama kalian. Komunitas ini mengajarkan kita bersikap lebih adil dan bijaksana dan menjadi rumah bersama untuk kedepannya.
14. Yang terakhir kepada semua pihak yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Terimakasih atas dukungan dan bantuannya atas penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada semua pihak, khususnya kepada civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta demi perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya.

Yogyakarta, 23 Januari 2014
Penulis,

Jhoni Sutangga
NIM. 08510014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Landasan Teori	13
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : TEORI KEDAULATAN NEGARA DAN RAKYAT	18
A. Kedaulatan Negara Dan Rakyat	18
1. Kedaulatan Negara.....	18
a. Teori Yunani Kuno	19
b. Teori Abad Pertengahan.....	25
c. Teori Abad Modern	29
d. Era Kontemporer	42
2. Kedaulatan Rakyat	49

B. Tinjauan Filsafat Politik	53
1. Pengertian Filsafat	53
2. Pengertian Politik	55
3. Filsafat Politik	60
BAB III : SISTEM POLITIK TRADISIONAL MASYARAKAT SASAK	65
A. Letak Geografi Dan Demografi Lombok.....	65
B. Lombok Dalam Sejarah	74
C. Sosial Masyarakat Sasak.....	84
1. Stratifikasi Sosial	84
2. Peran Tokoh Tradisional, Agama dan Adat.....	89
3. Kepercayaan Masyarakat Sasak.....	93
a. <i>Wetu Telu</i>	93
b. Waktu Lima	100
4. Sistem Pendidikan Di Masyarakat Sasak.....	101
5. Sistem Kekerabatan	
- <i>Genealogis</i> dan Kelompok Kekerabatan	106
D. Sistem Politik Tradisional.....	112
1. Sistem, Politik dan Sistem Politik.....	112
2. Politik Tradisional.....	115
E. Politik Tradisional Masyarakat Sasak.....	116
1. Komunitas Bangsawan “ <i>Menak</i> ” (Aristokrat).....	119
a. Ruang Lingkup Sosial.....	119
b. Lembaga Paguyuban / Adat	129
c. Kepemimpinan Simbol Legitimasi Kekuasaan.....	134
2. Komunitas Tuan Guru.....	147
a. Ruang Lingkup Sosial.....	146
b. Organisasi Islam di Lombok	150
- Nahdlatul Ulama	150
- Nahdlatul Wathan	158
c. Politik “Praktis” Antara Amanah dan Kepentingan.....	161
1. Politik Islam di Indonesia.....	161
2. Politik Lokal Tuan Guru di Lombok.....	163

3. Tatanan Nilai Masyarakat Sasak	168
BAB IV : EOFORIA POLITIK SASAK	174
A. Politik Dan Kekuasaan Negara	174
B. <i>Eovoria</i> Politik Sasak.....	189
1. Bangsawan “ <i>Menak</i> ” Sasak	190
2. Tuan Guru	205
C. Dampak Politik Sasak	223
1. Politik Identitas	223
2. Politik Dinasti	226
3. Politik Irasional	230
BAB V : PENUTUP	239
A. Kesimpulan	239
B. Saran	242
BIBLIOGRAFI	243

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suku Sasak merupakan suku yang bertempat di pulau Lombok provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebuah pulau yang terletak di sebelah timur Bali dan sebelah selatan barat Sumbawa. Pada bagian Barat, terletak selat Lombok dan pada bagian Timur, terdapat selat Alas. Di sebelah utara Lombok juga berbatasan dengan laut Jawa dan disebelah timur lautan Indonesia di bagian selatannya. Dua hari setelah kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 19 Agustus 1945, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Timor, Rote, Sumba dan Sawu digabungkan ke dalam Propinsi Sunda Kecil dengan Ibukotanya Singaraja, Bali dan dipimpin oleh seorang Gubernur I Gusti Ketut Pudja. Pada tanggal 14 Agustus 1985 propinsi Sunda Kecil dipisah menjadi tiga propinsi yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sampai hari ini pulau Lombok dan pulau Sumbawa mengisi propinsi NTB.¹

Jika dilihat dari sisi historis masyarakat Sasak Lombok merupakan masyarakat korban kolonialisme yang berlipat ganda. Jawa, Makassar, Bugis, Bali, Belanda dan Jepang berhasil menguasai Lombok lebih kurang satu milenium. Kerajaan Hindu-Majapahit dari Jawa timur masuk ke Lombok pada abad ke-15 dan memperkenalkan Hindu Budhisme ke kalangan orang Sasak. Selanjutnya Makasar tiba di Lombok Timur pada abad ke-16 dan berhasil menguasai Selaparang, kerajaan orang Sasak asli. Kerajaan Bali dari Karangasem

¹ Erni Budiwanti, *Islam Sasak: Wetu Telu Versus Waktu Lima* (Yogyakarta: Lkis Press, 2000), hlm. 4.

menduduki daerah Lombok Barat sekitar abad ke-17 dan mengkonsolidasikan kekuasaannya terhadap seluruh Lombok setelah mengalahkan kerajaan Makasar pada tahun 1740.¹

Lombok di lihat dari sebelum kedatangan pengaruh asing, *Boda* merupakan kepercayaan asli orang Sasak. Orang Sasak pada waktu itu yang menganut kepercayaan ini, disebut sebagai *Sasak-Boda*. Agam Boda di orang Sasak asli terutama ditandai oleh animisme dan phantaisme. Sebuah pemujaan dan penyembahan roh-roh dan berbagai dewa lokal lainnya merupakan fokus utama dalam keagamaan *Sasak-Boda*.² Namun setelah masuk pengaruh asing sampai hari ini dilihat dari kebiasaan keagamaan, Sasak bisa dibagi kedalam *Waktu Lima* dan *Wetu Telu*.

Waktu Lima ditandai oleh ketaan yang tinggi terhadap ajaran-ajaran Islam. Komitmen mereka lebih besar jika dibandingkan dengan Islam *Wetu Telu*. Sehari-hari ibadah mereka terwujud dalam ketaatan mereka terhadap lima rukun Islam. Seperti shalat lima waktu, puasa ramadhan, membayar zakat kepada orang yang memerlukan, dan berhaji ke tanah suci Mekah jika mereka mampu. Kecintaan yang tinggi terhadap praktek-praktek ini maupun terhadap syari'ah membuat komitmen kurang atau ketaan mereka pada aturan-aturan adat lokal menipis. Adat, khususnya yang berlawanan dengan hukum Islam. Sudah sejak lama disingkirkan oleh *Waktu Lima*. Hanya bagian-bagian tertentu yang tidak bertentangan dengan Islam yang masih dipertahankan.³

¹ Erni Budiwanti, *Islam Sasak*, hlm. 9.

² Erni Budiwanti, *Islam Sasak*, hlm. 8.

³ Erni Budiwanti, *Islam Sasak*, hlm. 7.

Beda halnya dengan *Wetu Telu*, mereka adalah orang Sasak yang meskipun sebagai Muslim terus memuja roh para leluhur, berbagai dewa roh dan lain-lainnya di dalam lokalitas mereka. Dalam kehidupan sehari-hari mereka cenderung mengabaikan praktek Islam yang rutin yang dianggap wajib oleh kalangan *Waktu Lima*. Adat memainkan peran dominan di kalangan komunitas *Wetu Telu*, dan dalam beberapa hal praktek adat bertentangan dengan Islam. Meskipun mereka menyadari aturan-aturan adat tertentu, sepertinya memberi penghormatan kepada para leluhur di kuburan dan memuja roh-roh mereka, jelas berlawanan dengan Islam, kalangan *Wetu Telu* memeliharanya sebagai bagian dari tradisi keagamaan mereka. *Wetu Telu* tidak menggariskan suatu batas yang jelas antara agama dan adat. Karenanya adat sangat bercampuran dengan agama lokal⁴.

Adanya penampakan dua wajah Islam Sasak tidak lepas dari faktor pengaruh kekuasaan yang pernah hadir di pulau syurga bumi ini.⁵ Begitu juga dengan konteks politik “kekuasaan” yang selalu terisi dari hirarki sosial, sosok dari kalangan aristokrat, ulama’ dan birokrat.⁶ Kaum aristokrat yaitu bangsawan di kalangan masyarakat Sasak selalu memiliki ruang hidup. Di Jawa dan Bali ruang hidup bangsawan adalah Keraton, Pura dan Puri⁷. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan bangsawan menak Sasak. Menurut data sejarah, baik kerajaan pagutan, Selaparang, maupun pejanggik, tidak ada yang memiliki

⁴ Erni Budiwanti, *Islam Sasak*, hlm. 8.

⁵ Alam Lombok demikian Indah, menguraikan kondisi alam dan fenomena Lombok ini tentu patut di syukuri dan dinikmati. Sebuah ungkapan TGH. Zainul Madji (*Tuan Guru Bajang*), gubernur NTB 2008-2013 dalam pengantar buku Sarjono, *Politik Tuan Guru Bajang. Fajar Kebangkitan Demokrasi di Lombok* (Malang: Enzal Press, 2012), hlm. xxiii.

⁶ Kina, “Pilkada NTB Pertaruhan Demokrasi dan Kesejahteraan”, dalam *Kompas*, 10 Mei 2013.

⁷ Ari Dwipayana, *Bangsawan dan Kuasa* (Yogyakarta: Ire Press, 2004), hlm. 25.

warisan tradisi arsitektur. Akibatnya, tidak ada pusat-pusat anutan yang memiliki kekuatan filosofis, baik itu yang dibangun dari mitos sebagai cara mempersatukan masyarakat, maupun warisan arsitektur sebagai simbol institusi kekuasaan yang secara politis mempunyai botot yang setara dengan institusi kebangsawanannya itu.⁸

Aristokrat dapat disebut juga dengan aristokrasi. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani *aristos* (kuat), dan *kratein* (menjadi kuat, memerintah). Dalam pemahaman lebih lanjut istilah ini memiliki beberapa arti; 1. Sebuah pemerintah yang dijalankan oleh orang-orang pilihan yang dipilih berdasarkan kriteria (golongan, status, kekuasaan, prestasi, keturunan bangsawan) 2. Pemerintah oleh segelintir kecil orang yang dipandang memiliki hak-hak khusus dan memiliki status lebih tinggi dalam masyarakat dan karena itu secara kodrat memiliki hak kepemimpinan 3. Salah satu bentuk pemerintahan ideal. Aristokrasi berarti pemerintah oleh yang terbaik demi kepentingan seluruh masyarakat, tetapi tanpa partisipasi rakyat.⁹

Dalam pandangan filsuf klasik istilah ini mengandung beberapa makna. Bagi Plato, aristokrasi merupakan susunan masyarakat ideal, hal ini bertentangan dengan empat bentuk pemerintahan yang mengalami kemerosotan (timokrasi, oligarki, demokrasi, dan despotisme).¹⁰ Beda halnya dengan Aristoteles, yang memaknai aristokrasi merupakan satu dari tiga bentuk pemerintahan yang diinginkan, dua yang lain adalah monarki dan politeria. Selanjutnya, bagi Hobbes

⁸ Ari Dwipayana, *Bangsawan dan Kuasa*, hlm. 25.

⁹ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 79.

¹⁰ *Timokrasi* yaitu pemerintahan atas dasar nilai. *Oligarki*, pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang dari golongan elite (bangsawan atau kapitalis). *Demokrasi*, pemerintahan atas dasar kerakyatan (perwakilan) dan *Despotisme* merupakan kesewenang-wenangan dalam memimpin. Lihat Pius. A. Partanto dan M. Dahlan Al- Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola Press, 1994).

mengartikan aristokrasi tidak lain menunjuk pada bentuk pemerintahan di mana kedaulatan bercokol ditangan segelintir orang saja.¹¹

Selanjutnya, komunitas ulama' dalam kontek kekuasaan dikalangan masyarakat Sasak merupakan ekspresi politik kaum santri. Antara bangsawan dan para kiai dalam corak politiknya bagi Clifford Geertz memiliki perbedaan makna yang tajam. Bangsawan akan terkait dengan keturunan sedangkan para santri terkait dengan akselerasi seseorang yang terbingkai oleh isu kebudayaan (adat) dan didukung oleh basis produksi yang kuat.¹² Dalam kontek sejarah kebangsaan Indonesia, kemerdekaan yang berhasil diraih oleh bangsa ini tidak lepas dari peran kaum santri (kiai). Pesantren sebagai basis produksi yang dikelola oleh kiai pada saat – saat penjajahan tidak hanya dijadikan sebagai media untuk memperdalam ilmu agama, tetapi sebagai pusat perjuangan untuk melawan para penjajah. Visi politik kiai ketika itu hanya satu, melawan perjuangan untuk membela bangsa dan negara.¹³ Namun, lain halnya dengan kiai rata-rata di beberapa wilayah Indonesia hari ini. Ekspresi perjuangan politik tidak hanya terlihat pada gerakan-gerakan yang mengandung muatan nilai idealis substantif, tetapi kecenderungan politik praktis kini mulai digeluti. Hal tersebut amat begitu terlihat di suku Sasak di pulau Lombok.¹⁴

Hadirnya golongan Bangsawan dan Tuan Guru di kalangan masyarakat Sasak dalam kontek politik kekuasaan merupakan manifesati dari ekspresi politik.

¹¹ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, hlm. 79 – 80.

¹² Badrun A.M, *Membongkar Politik NTB* (Yogyakarta: Genta Press, 2006), hlm. 32.

¹³ Ibnu Hajar, *Kiyai di Tengah Pusaran Politik, antara petaka dan kuasa* (Yogyakarta: iRCiSoD Press, 2009), hlm. 71.

¹⁴ Muhammad Sukri, *Identitas Sasak. Redefinisi Komunitas Yang Terbayang*. Tesis Pasca UGM, Yogyakarta. 2004, hlm. 61.

Bicara masalah politik kekuasaan Sasak maka tidak lepas dari melihat obyek kedua golongan tersebut. Golongan Tuan Guru dibentuk oleh proses sosial karena pengaruhnya yang demikian kuat dalam ruang budaya atau karena kecanggihannya “memainkan” eksotisme sejarah dan mengesplorasi simbol-simbol budaya untuk mengaktualisasi eksistensinya. Dengan demikian kelompok santri (Tuan Guru) merupakan kelompok dapat terbentuk dan dibentuk kapanpun.¹⁵

Sistem kekuasaan dan prestise seringkali menghubungkan atau menyusun silsilah dirinya dengan kerajaan pada masa lampau yang pernah memerintah negeri atau suku bangsa-nya dan terkadang membuat silsilah keturunan yang bersifat “khayali”.¹⁶ Untuk membentuk struktur kekuasaan/politik orang Sasak sendiri telah memasukkan sebuah ideologi yang berperan untuk menjadi semacam kekuatan sebagai perekat yang akan mengikat berbagai kelas dan strata yang berbeda.¹⁷ Dengan demikian, legitimasi para elite Sasak membentuk sebuah kekuasaan atau otoritas kelas dalam masyarakat Sasak dengan golongan *Tuan Guru (Santri)* dan *menak* (bangsawan) orang Sasak. kehadiran dua komunitas besar bangsawan Sasak dan Tuan Guru dalam kancah politik kekuasaan Sasak merupakan bentuk atau sikap terhadap pemahaman politik mereka. Meskipun

¹⁵ Badrun A.M, *Membongkar Politik NTB*, hlm. 32.

¹⁶ Heine-Geldern, R., *Konsepsi Tentang Negara dan Kedudukan Raja di Asia Tenggara* terj. Deliar Noer (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 25.

¹⁷ R. Simon, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 37. Lihat Juga Clifford Geertz, *Politik Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 1992). Dan A.A. Dwipayana, *Kelas dan Kasta Pergulatan Kelas Menengah Bali*, (Yogyakarta: Laperia Pustaka Utama. 2001), hlm. 11.

sering dinilai tidak ubahnya bagaimana mereka mempertahankan *Statusquo* diakalangan masyarakat ketiga yaitu masyarakat biasa (*Jajarkarang*)¹⁸.

Legitimasi kekuasaan yang terlihat dalam komunitas bangsawan *Menak* dan *Tuan Guru* ini mencerminkan sekat sosial yang rekat. Komunitas bangsawan meyakini bahwa sistem tatanan keturunan (genealogis) merupakan sesuatu yang mutlak dalam trasidi kekeluargaan. Begitu juga dengan komunitas *Tuan Guru*, sebuah komunitas yang berlatarbelakang ulama' dalam kancah politik mampu mentransformasikan nilai-nilai religiusitas, demokratis, makmur dan sejahtera. Hal tersebut dalam analisa komunitas ini pemimpin-pemimpin sebelumnya telah gagal memipin publik.¹⁹

Legitimasi kekuasaan dalam sejarah yang paling kuno sebenarnya adalah legitimasi religius. Kekuasaan dihayati dan diterima sebagai sesuatu dari alam gaib. Raja dipandang sebagai pengejawantahan Tuhan. Implikasi terpenting legitimasi religius ialah bahwa penguasa dalam menjalankan kekuasaannya berada diatas penilaian moral. Karena disatu pihak penguasa sendiri lebih dipandang sebagai wadah sesuatu kekuatan yang menggerakkannya, daripada sebagai penanggung jawab atas tindakan-tindakannya. Jika rakyat sudah terlihat muak terhadap titah atau pun ulah pemimpin maka hal penting yang terjadi adalah pendobrakan legitimasi religius tersebut.²⁰

¹⁸ Bukan dari golongan bangsawan dan golongan *Tuan Guru*. Dalam bahasa Karl Marx mereka adalah golongan ploretariat yang selalu menikmati sistem, bentuk negara yang di ekspolitasi.

¹⁹ Sarjono, *Politik Tuan Guru Bajang*, hlm. 100. Dalam kajian buku tersebut mengupas keberhasilan sosok *Tuan Guru Bajang* (Zainul Madjdi) dalam kontestan politik PILGUB 2008.

²⁰ Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1986), cet 1, hlm. 1-2.

Pendobrakan yang memiliki moment penting dari tiga lainnya adalah pendobrakan paham religius kekuasaan masyarakat Yunani. Masyarakat Yunani kuno tidak mengenal dengan negara teritorial besar, melainkan terorganisasi dalam beberapa negara kota yang berdaulat. Urusan kenegaraan merupakan urusan biasa dan dipegang oleh warga negara biasa. Menganalisa persoalan di atas enam ratus tahun sebelum Masehi lahirlah filsafat politik dengan pertanyaan; apa yang lebih baik bagi negara, adanya pemimpin yang baik, atau sistem hukum yang baik?. Pertanyaan ini sekaligus menandakan masuknya pemikiran rasional - fungsional ke dalam filsafat politik.²¹

Filsafat politik bukan merupakan disiplin historis, sekalipun tidak bisa mengabaikan dimensi historisnya. Ia lebih dari sekedar pembacaan ide-ide pemikir sosial dan politik atau pencarian ide-ide dalam kaitannya dengan moralitas publik. Permasalahan mengenai watak realitas politik tidak bisa dikesampingkan sebab permasalahan mengenai bagaimana menjawab problem-problem adalah hal yang amat penting. Filsafat politik adalah studi tentang ide-ide dan institusi-institusi yang berkembang sepanjang waktu. Kehadiran filsafat politik menjelaskan pemahaman mengenai cara bagaimana manusia di sepanjang zaman membentuk dan mengimplementasikan aspirasi politik dan sosial mereka.²²

Dalam studi politik tidak terbatas pada masalah deskripsi atau analisis terhadap institusi-institusi yang ada dan cara institusi itu berfungsi. Dibalik

²¹ Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, hlm. 3.

²² Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik. Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Press, 2002), hlm. 8, 24 dan 25. Lihat juga Leo Strauss, *Politic philosophi and history*. Jurnal of the histori of ideas, 1949, hlm. 30.

institusi-institusi ini ada nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang nampak dan tujuan institusi tersebut didesain. Politik sebagaimana halnya dengan etika, pada dasarnya merupakan ilmu mengenai tatanan dimana watak manusia bisa sampai pada kesempurnaan yang maksimal. Filsafat politik atau pelacakan perilaku dan fenomena politik dalam suatu kerangka etik, merupakan bagian integral dalam studi politik. Bagi pemikir besar ilmu sosial mengakui dan tidak ragu-ragu untuk menggali persoalan metafisik menganai watak manusia²³ dan nilai-nilai yang harus diikuti masyarakat. Karena memang persoalan tersebut tidak ditemukan dalam ilmu pasti.²⁴

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem politik tradisional masyarakat Sasak?
2. Bagaimana tata nilai sistem politik masyarakat Sasak dalam perspektif filsafat politik?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran maupun jawaban dari permasalahan yang dipaparkan dalam rumusan masalah di atas. Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk Mendeskripsikan Sistem Politik Tradisional Masyarakat Sasak

²³ Kajian dasar manusia terdapat pada filsafat manusia. Filsafat manusia adalah bagian integral dalam sistem filsafat, yaitu secara spesifik menyorot hakikat atau esensi manusia. Lihat Kasdin Sihotang, *Filsafat Manusia* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 21.

²⁴ Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik*, hlm. 25.

2. Untuk menjelaskan Sistem Politik Tradisional Masyarakat Sasak dalam kajian filsafat politik.

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara akademik, menjadi sumbangan pemikiran dan landasan rintisan bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan (Politik tradisional lokal di Indonesia) terutama dalam bidang jurusan Filsafat Agama.
2. Sebagai acuan atau bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut dalam proses kajian yang sama.
3. Memberikan wawasan serta pemahaman tentang Sistem Politik Tradisional Masyarakat Sasak (suatu kajian filsafat politik) kepada masyarakat yang belum mengetahuinya terutama yang ada di Indonesia.

C. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan salah satu usaha untuk memperoleh data yang sudah ada, karena data merupakan satu hal yang terpeting dalam ilmu pengetahuan, yaitu untuk menyimpulkan fakta-fakta, meramalkan gejala-gejala baru, mengisi yang sudah ada atau sudah terjadi.²⁵ Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis, hingga saat ini belum ditemukan yang spesipik membahas Sistem Politik Tradisional Masyarakat Sasak khususnya dalam kajian filsafat politik sebagai karya tulis baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun dalam bentuk karya ilmiah lainnya.

²⁵ Taufik Abdullah dan Rusli Karim (ed), *Metode Penelitian Agama; Sebuah Pengantar* , (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991), hlm. 4.

Namun untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah di atas, penulis berusaha melakukan penelitian terhadap beberapa literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian ini. Ada beberapa karya tulis yang membahas tentang masalah politik tradisional di Indonesia terutama di Lombok NTB baik yang berbentuk buku, kumpulan tulisan maupun dalam bentuk karangan terbesar. Beberapa tulisan tersebut antara lain:

Politik Tuan Guru Bajang Fajar Kebangkitan Demokrasi di Lombok. Karya Skripsi yang dibukukan Sarjono alumnus Ilmu Komunikasi Fakultas Sosial Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012. membahas kebangkitan Fajar demokrasi di Lombok dengan menyorot satu tokoh yaitu Tuan Guru Zinul Majdi atau yang akrab disebut dengan Tuan Guru Bajang dalam pemenangan kontestan politik (PILGUB) 2008 di Lombok NTB.

Politik Tuan Guru; Sketsa Biografi . Karya Drs. Nasri Anggara, MA. Buku ini merupakan tesisnya ketika menyelesaikan Strata 2 di Program Pasca Sarjana Politik Islam di Institut Agama Islam Al-Aqidah (IAIA) Jakarta pada tahun 2008. Buku ini membahas seputar pergolatan TGH. Lalu Muhammad Faisal dan Perannya mengembangkan NU di Lombok. Dalam buku ini juga membahas perihal peran kiyai dalam kancah politik. Tetapi isi buku ini yang utama adalah bagaimana NU masuk di Lombok NTB dan dikembangkan oleh TGH. Lalu Muhammad Faisal.

Kekerasan kerajaan surgawi; Gagasan Kekuasaan Kyai dari Mitos Wali hingga Broker Budaya. Karya Chumaidi Syarief Romas pada tahun 2003. Isi pokok buku ini adalah membongkar kekerasan struktural dan hirarkis sosial dalam

konteks Pondok Pesantren Konservatif dan Progresif. Terutama dikalangan kiyai yang menjadi semacam mitos wali dan kekuasaan Jawa menuju masyarakat. Adanya semacam legitimasi Kiyai atas masyarakat dalam mempertahankan *Statusquo*.

Kiyai di Tengah Pusaran Politik; antara petaka dan kuasa. Buku karya Ibnu Hajar 2009. Isi pokok dalam buku ini adalah analisis atas gerakan politik para kiyai (pewaris para nabi) di Indonesia. Hal yang membedakan dari rancangan penulisan skripsi penulis adalah pada wilayah objek penelitian serta sistem politik tradisional yang ada dan pendekatan yang dipakai. Jika beberapa tulisan buku diatas membahas seputar pergolakan Kiyai dalam kancah politik ruang lingkup pulau Jawa dan Indonesia maka, dalam penulisan rancangan Skripsi ini adalah peran serta Bangsawan Sasak dan para Tuan Guru dalam hegemoni kekuasaan di Lombok NTB. Adapun pendekatan yang akan penulis pakai adalah pendekatan filsafat politik.

Kegigihan para bangsawan dan para Tuan Guru di Lombok dalam kancah politik menimbulkan tanya besar dibalik semua itu. Politik bicara masalah kekuasaan, seringkali kekuasaan hanya semacam antusiasme sementara. Disamping itu fenomena kekuasaan di Lombok terlihat ironis dengan bertahannya *Statusquo* feodilisme. Jika kelompok ketiga (masyarakat biasa bukan dari golongan bangsawan dan Tuan Guru) kesulitan mendapatkan peran serta dalam partisipasi politik. Hal tersebut terlihat dari jajaran birokrasi desa hingga tingkat daerah.

D. Landasan Teori/ Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat politik dalam membaca politik tradisional dan politik identitas dikalangan masyarakat Sasak. Pendekatan filsafat politik digunakan untuk menganalisis berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan politik atau dengan bahasa lain kegiatan yang berhubungan langsung dengan politik praktis. Seperti halnya kegiatan yang dilakukan oleh para bangsawan dan para Tuan Guru di Lombok yang hari ini begitu terlihat menimbulkan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan politik tradisional lokal di Lombok dan Nusa Tenggara Barat. Dalam proses politik biasanya masalah kepemimpinan dipandang sebagai faktor penentu dan senantiasa menjadi tolak ukur.²⁶ Untuk itu penting diketahui klasifikasi kepemimpinan yang secara umum telah dibedakan oleh Max Weber ke dalam tiga jenis otoritas: (1) otoritas kharismatik, yaitu berdasarkan pengaruh dan kewibawaan pribadi, (2) otoritas tradisional, yang dimiliki berdasarkan pewarisan, (3) otoritas legal-rasional, yaitu yang dimiliki berdasarkan jabatan serta kemampuannya.²⁷ Penelitian ini menggunakan teori relasi kuasa. Secara genealogis, teori relasi kuasa diperkenalkan oleh Michel Focault. Ia banyak mengupas tentang hubungan kecurigaan dan kepentingan dalam relasi pengetahuan (*knowledge*) dan kekuasaan

²⁶ Ben Anderson (1990) dalam Sukardi Rinakit menguraikan kinerja dan performa pemimpin ditinjau dari perspektif budaya politik pada dasarnya merupakan transformasi dari sumber-sumber kekuasaan yang kongkrit. Dengan demikian, kinerja yang baik disebut sebagai padanan dari wahyu-wahyu kekuasaan (pulung), Keris dan Tombak yang menjadi yang menjadi sumber legitimasi kekuasaan dalam bentuknya yang lain. Lihat Sukardi Rinakit, “Analisa Politik”, dalam *Koran*, 12 November 2013, hlm. 15.

²⁷ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 19. Lihat juga Miriam Budiardo (dkk.), *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa* (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hlm. 14-15.

(power).²⁸ Kuasa menurut definisi Michel Foucault adalah suatu hal yang tidak hanya dimiliki tetapi dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup dimana ada banyak posisi, yang berkaitan satu sama lainnya. Preposisi ini mengantarkan pada satu kesimpulan bahwa strategi kuasa bersifat *de-centering* sehingga prosesnya berlangsung dimanapun, dimana terdapat susunan, aturan-aturan, sistem-sistem regulasi, dimana ada manusia yang saling berhubungan dengan dunia tertentu, disitulah relasi kuasa hidup dan beroperasi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara bertindak menurut sistem aturan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.²⁹ Dalam pengertian yang lain menyebutkan penelitian adalah pencarian fakta menurut metode obyektif yang jelas, guna menemukan fakta dan menghasilkan dalil atau hukum tertentu atas hasil penelitian.³⁰

Adapun metode penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang saya lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu yang bersifat studi kepustakaan (*Library research*). Sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber pustaka baik primer maupun sekunder. Dengan jenis penelitian ini

²⁸ Yasraf A. Piliang, *Transpolitika. Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas*, peng. Haryatmoko (Yogyakarta: Jalasutra, 2005), hlm. 286. Lihat juga Michel Foucault, *Disiplin Tubuh. Bengkel Individu Modern* (Yogyakarta: Lkis, 1997).

²⁹ Anton H. Barkker, *Metode-metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 6.

³⁰ Muhammad Zadzir, *Metode Penelitian I* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 14.

diupayaan dapat membuat suatu deskripsi atau gambaran atas obyek penelitian secara sistematis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bersifat deskriptif-analitis yaitu dengan mendeskripsikan sistem politik tradisional masyarakat Sasak di Lombok yang dilihat dari filsafat politik dengan melihat beberapa lintasan konsep pemikiran Barat atas dinamika sosial dan ekonomi politiknya. Selanjutnya dengan menggunakan analitis-interpretatif atas kenyataan sosial masyarakat Sasak di Lombok sehingga dapat dibaca relevan atau tidak dengan kenyataan yang ada.

3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian penulis adalah kondisi sistem sosial politik masyarakat Sasak di Lombok yang dilihat dari segi kancan kekuasaan tradisional yang diampu oleh para bangsawan *Menak* dan *Tuan Guru*.

4. Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah kajian pustaka, sehingga pengumpulan data dilakukan secara literer/literatur yakni dengan meneliti sumber-sumber yang ada baik secara tertulis (primer dan sekunder) maupun fakta lapangan yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data adalah usaha kongkrit untuk memberikan interpretasi terhadap data-data yang telah tersedia. Penelitian ini akan menggunakan analisis kualitatif karena data-data yang digunakan

adalah data kualitatif serta penjelasannya dalam bentuk ungkapan-ungkapan dan kalimat.

6. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat soial politik. Sisi sosial terlihat dengan deskripsi masyarakat Sasak dalam kancah sistem sosial politik (kekuasaan) dan sisi filosofis terlihat pada pembacaan atas realita sosial berdasarkan pada kajian filsafat politik dalam dinamika sosial dan politik. Hal tersebut tentu dengan dasar teori-teori dan penalaran.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih dan sistematis, dalam penyusunan akan dibagi ke dalam beberapa bab yang masing-masing terdiri atas beberapa sub-bab.

Bab *Pertama* adalah pendahuluan yang terdiri enam sub-bab yaitu: latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metodelogi penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam bab ini diuraikan objek penelitian serta langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian dari awal hingga akhir.

Bab *Kedua* mendeskripsikan serta menguraikan secara umum tentang teori kedaulatan negara dan rakyat Yunani kuno, Modern dan teori keadilan kontemporer dilihat dari pandangan para filsuf politik. Selanjutnya menguraikan tinjauan filsafat politik yang terdiri dari definisi filsafat, politik serta hubungan keduanya yang diakhiri dengan uraian tugas dan tujuan filsafat politik.

Bab *Ketiga* memaparkan tentang letak geografis dan kondisi geografis pulau Lombok yang dilanjutkan dengan paparan kondisi sosial masyarakat Sasak Lombok serta sistem politik tradisional yang diakhiri dengan gambaran sistem nilai masyarakat atau tata nilai masyarakat Sasak.

Bab *Keempat* menganalisis serta mengkaji secara umum sistem politik tradisional masyarakat Sasak di Lombok dalam kajian filsafat politik. dalam upaya menemukan gagasan analisis penulis terlebih dahulu memaparkan pemikiran - pemikiran penting para filsuf politik dalam hal sosial dan ekonomi politiknya terutama yang berkaitan dengan konsep negara. Sehingga jika hal tersebut sudah terlaksana maka dapat dijabarkan bagaimana kajian filsafat politik melihat sistem politik tradisional masyarakat Sasak dalam perspektif pemikirannya.

Bab *Kelima* yaitu penutup yang berisi kesimpulan hasil analisa dari seluruh bahasan mengenai sistem politik tradisional masyarakat Sasak dilihat dalam kajian filsafat politik. Bagian ini bertujuan untuk memperjelas dan menjawab bagian yang terdapat dalam rumusan masalah. Bab ini diakhiri dengan kata penutup yang berisi kesimpulan serta kritik dan saran sesuai dengan pemahaman peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian dan penelitian terhadap sistem politik tradisional dalam pandangan filsafat politik, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Politik Tradisional Masyarakat Sasak merupakan suatu sistem politik yang dijalankan atau di aktualisasikan oleh aktor politik “kekuasaan” di masa kini dengan simbol-simbol tradisi lama yang ada dalam kelompok mereka. Simbol-simbol itu kemudian diligitimasikan terhadap pola hubungan antar manusia dengan meliputi kekuatan dan otoritas yang kemudian melibatkan sesuatu yang luas sebagai lokus kekuasaan. Kekuasaan adalah motif utama dalam konstelasi politik, aritnya politik sejatinya bicara masalah kekuasaan.
2. Sistem Politik Tradisional masyarakat Sasak tercermin dan paling mengakar adalah pada golongan Bangsawan *menak* Sasak dan Tuan Guru yang tergolong dalam masyarakat elit.
3. *Menak* dan Tuan Guru sebagai elit masyarakat Sasak memiliki posisi ganda. *Menak* selain sebagai pelaku budaya Sasak tetapi juga sebagai aktor politik. *Menak* Sasak dalam ruang politik merupakan interpretasi dari partisipasi politik elit budaya. Begitu juga dengan komunitas Tuan Guru, keterlibatannya dalam ruang politik menjadikan diri mereka

memiliki peran serta pungsi ganda yaitu aktor politik dan pimpinan pondok pesantren dan kelompok Tuan Guru merupakan ekspresi politik kaum santri.

4. Golongan bangsawan *Menak* Sasak dan Tuan Guru dalam kancah politik mencerminkan legitimasi kekuasaan yang sarat dengan rekayasa dan konstruksi *Statusquo* yang langgeng terhadap kelompok yang lain yaitu *jajarkarang*. Hal ini menyebabkan terjadi marjinalisasi (pengasingan), pemagaran politik dan sekat sosial terhadap kelompok masyarakat Sasak yang lain.
5. Sistem Politik “kekuasaan” golongan bangsawan *Menak* Sasak dan Tuan Guru mencerminkan politik identitas (*genealogis*), politik dinasti (nepotisme-kroonisme) dan praktik politik irasional dalam sebuah tatatan sistem modern.
6. Bentuk dari politik irasional dalam komunitas-komunitas tersebut adalah dengan melanggengkan legitimasi agama, legitimasi budaya dan legitimasi kuasa rupiah yang merajalela. Praktik ini bertolak belakang dari konsep sistem tatanan nilai pada diri masyarakat Sasak yang termaktub dalam *Awiq-awiq* Sasak.
7. Masyarakat Sasak dalam kontek sosial seperti masyarakat yang lain memiliki konsep hidup bersama apa yang disebut sebagai tata nilai. Artinya tata nilai yang ada dari budaya adat Sasak dijadikan sebagai falsafah atau sitem tata aturan moral (*Awiq-awiq*) dalam kehidupan.

8. Tata nilai masyarakat Sasak termaktub dalam *Awiq-awiq*; norma adat, aturan hukum dan etika kebersamaan dalam segala aspek sehingga, dengan tata nilai yang dianut mampu mewujudkan keselarasan, kebebasaan, harmonisasi dan seterusnya sesuai dengan falsafah adat *game* (teologis/vertikal), adat *tapsile* (sosial/horizontal) dan adat *luirge* (interaksi dengan alam/universal).
9. Konsep tata nilai masyarakat Sasak termaktub dalam tiga lapisan yaitu lapisan utama, menengah dan bawah;
 - a. Lapisan utama memberi nilai yang fundamental bagi lapisan kedua dan ketiga apa yang disebut sebagai tata nilai *Tindih*. Semacam konsep *Insanul Kamil*.
 - b. Lapisan menengah merupakan nilai budaya yang berfungsi sebagai penyangga atau pertahanan dan tanggung jawab moral. Konsep ini disebut sebagai *Merang, Maliq* yaitu konsep boleh tidak, halal haram, terlarang atau tidak untuk dilakukan guna mempertahankan kualitas dan kpribadian. *Merang*, merupakan nilai solidaritas sosial.
 - c. Pada lapisan bawah merupakan simbol nilai yang mengaktualisasikan nilai utama diatas Seperti *Patut, Patuh, Patju, Geger Genem, Gerasa, Tatas Tuhu Trasna, Titi, Tetes, Tatas* dan *Bareng enyong saling sedoq*. Semua ini terakumulasi dalam kearifan nilai lokal yang terambil dari lapisan utama dari budaya Sasak, yakni, *Solah, Soleh, Soloh, Rapah, Rema* (baik/kebaikan,

saleh/kealehan, damai/kedamaian, setara/kesetaraan, bersama/persamaan).

B. Kritik dan Saran

1. Hendaknya identitas dan sikap kultusasi dinasti dibuang jauh dalam dinamika politik. Karena hal itu bertolak belakang dari hakikat demokrasi bahkan hal itu akan memperlemah demokrasi itu sendiri.
2. Politik tidak mengenal status, identitas seseorang atau suatu kelompok, yang dikehendaki adalah pemahaman politik yang sehat sehingga bisa mencerminkan etika politik yang mengandung moralitas yang tinggi.
3. Jika bagi masyarakat biasa merasakan pengasingan dalam pemahaman politik oleh golongan-golongan itu maka ada tiga kemungkinan yang bisa terjadi. a. Mengikuti arus (permainan mereka)., b. Melawan arus (dengan mematahkan permainan mereka). dan c. Atau menciptakan alat tandingan tanpa harus menafikan yang pertama dan kedua.
4. Demokrasi tidak dimiliki oleh segelintir orang atau golongan tetapi demokrasi milik bersama sehingga dalam ruang politik pun setiap orang berhak untuk ikut terlibat dan mendapatkan singgasana kekuasaan yang mensejahterakan.
5. Tatanan nilai sebagai falsafah kehidupan menjadi corong moralistas berdemokrasi. Jika tatanan nilai itu rusak maka kehidupan pun akan rusak. Kerusakan hidup berwajah pada konflik, dendam dan

kekerasan. Hendaknya kita jaga tata nilai itu jika kita masih menganggap ada dan penting.

6. Akhirnya sebaik baik manusia adalah mereka yang berguna bagi yang lain bukan ditindas dan bukan pula menindas.

BILIOGRAFI

- Abdillah, Ubed. *Politik Identitas Etnis; pergulatan tanda tanpa identitas.* Magelang: Indonesiatera Press Anggota IKKAPI, 2002.
- Abdullah, Taufik. Karim, Rusli (ed). *Metode Penelitian Agama; Sebuah Pengantar.* Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991.
- Abdurrahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah Islam.* Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Abdurrahman, *Sistem Politik Indonesia*, Bab I (Pusat pengembangan bahan Ajar - UMB). Buku Panduan UNAIR.
- Adrain, Carles F. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial.* Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
- Agung, Ketut. A.A. *Kupu-kupu Kuning Yang Terbang Di Selat Lombok. Lintasan Sejarah Kerajaan Karangasem (1661-1950).* Denpasar, 1990.
- Alexander, Abe. *Perencanaan Daerah Partisipatif.* Solo: Pondok Edukasi, 2002.
- Aminuddin, *Kekuasaan Islam dan Pergelutan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudahnya Rezim Orde Baru.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Anam, Munir Che, *Muhammad SAW & Karl Mark.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Anggara, Nasri. *Politik Tuan Guru, Sketsa Biografi TGH. Lalu Muhammad Faisal dan Perannya Mengembangkan NU di Lombok.* Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- Anwar, H.M. *Sepintas Kilas tentang Nahdlatul Ulama di Pulau Lombok,* Arsif Inventaris PWNU NTB, tanggal 1 Januari 1990
- Atmadja, I. D. G. *Partai Politik dan Golongan Karya dalam Lintasan Perundangan.* Denpasar: Setia Kawan, 1989.
- Badrus. A.M. *Membongkar Politik NTB.* Yogyakarta: Genta Press, 2006.

- Bagoes, Ida. M. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Bakar, Abu. E. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Ar-ruzza Media. Cet.I, 2010
- Barkker, Anton H. *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Barker, Ernest. *The Politics of Aristoteles*. New York/London: Oxford University Press, 1958 dalam Terjemahan buku Aristoteles, *Politics*, Jilid IX Bab 7.
- Baswedan, Anis. “pengantar”, dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken, “*Politik Lokal di Indonesia*”, Jakarta: KITLV dan YOI, 2007.
- Berger, Peter L. & Luckman, Thomas . *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (diterjemahkan dari buku asli *The Social Construction of Reality* oleh Hasan Basari). (Jakarta: LP3ES, 1990
- Bertens, K. *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*. Jakarta: Gramedia, 2001.
- Bottomore, T.B. *Elit dan Masyarakat*. Jakarta: Akbar Tandjung Institute, 2006.
- Budiman, Arief. *Teori Negara, Negara, kekuasaan dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia Press, 1997
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum
- _____ Dkk. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan, Cet.I. 1984.
- Budiwanti, Erni. *Islam Sasak; Wetu Telu Versus Waktu Lima*. Yogyakarta: Lkis Press, 2000.
- Cersan. *Politik Kekuasaan Menurut Niccola Machiavelli (II Principe)*. Bogor: Kepustakaan Populer Gramedia, 1997.
- Delfgaauw, Bernard. *Sejarah Ringkas Filsafat Barat*. Terj. Soejono Soemargono. Yogyakarta: PT Tiara Wacana, Cet.I., 1992.
- Dwipayana, Ari. *Bangsawan dan Kuasa*. Yogyakarta: Ire Press, 2004.

- _____ *Kelas dan Kasta Pergulatan Kelas Menengah Bali*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2001.
- Effendy, Bahtiar. *Re Politisasi Islam; Pernahkan Islam berhenti berpolitik*. Bandung: Mizan Media Utama, 2000.
- Fauzan, *Gerakan Islamisasi Nahdlatul Wathan di Lombok Nusa Tenggara Barat (1934-1990)*, dalam *Fikrah: Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 1, Edisi 1, Nomor 1, Juli-Desember 2005.
- Fauzan, Ahmad. *Mitologi Asal Usul Orang Sasak. Analisis Struktur Pemikiran Orang Sasak dalam tembang Doyan Neda*. Tesis Pasca Sarjana Program Studi Antropologi Universitas Gjadah Mada. Yogyakarta, 2013.
- Foucault, Michel *Seks dan Kekuasaan*, S. H. Rahayu (Terj.). Jakarta: Gramedia, 2000.
- Freire, Pauloe. *Politik Pendidikan, Kebudayaan, kekuasaan dan pembabasan*. Terj. Agung Prihanto, Fuad Arif Fudiyartanto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet.I. 1999.
- Geldern R, Heine. *Konsepsi Tentang Negara dan Kedudukan Raja di Asia Tenggara*, Terj. Deliar Noer, Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Geertz, Clifford. *Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Hajar, Ibnu. *Kiyai di Tengah Pusaran Politik, antara petaka dan kuasa*. Yogyakarta: iRCiSoD Press, 2009.
- Harfin, Muhammad dkk. Gerung, Daud (ed). *Lombok Mirah Sasak Adi*. Jakarta: Imsak Press. Cet.I., 2011.
- Hadiwijono, Harun *Sari Sejarah Filsafat Barat I*. Yogyakarta: Kanisius, 1980
- Hardiman, Budi F. *Demokrasi Deliberatif*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Haryatmoko , *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas Press, 2003.
- Heine-Geldern, R., *Konsepsi Tentang Negara dan Kedudukan Raja di Asia Tenggara*, (Terj.) Deliar Noer. Jakarta: C.V. Rajawali, 1982.

- <http://bancarfamily.wordpress.com/2012/02/28/birokrasi-pemerintahan-menurut-max-weber>. Di Akses pada 2 Januari 2014
- <http://www.beritametro.co.id/opini/dinasti-politik-di-indonesia>. diakses 07 Januari 2014.
- <http://ledafc.wordpress.com/2011/04/17/konsep-kekuasan-michel-foucault/html>.
Di Akses pada 02 Januari 2014.
- http://Id.wikipedia.org/politik-dinasti-pengertian_dasar/Collins/English/Dictionary.
Di Akses 07 Januari 2014
- http://wiki.aswajanu.com/Pesantren_di_Propinsi_Nusa_Tenggara_Barat. di upload pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2013.
- http://www.gusdur.net/pemikiran/Detail/?id=75/hl=id/Tuan_Guru_Faisal_Potret_Kepribadian_NU. Di Akses 1 November 2013.
- http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/jenis-kuasa-bentuk-negara-dan_sistem.html. di akses pada 11 Desember 2013
- Isjwara, F. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Binacipta, Cet.VIII, 1982
- Irsyam, Mahrus. *Ulama dan Partai Politik Upaya Mengatasi Krisis*. Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1984.
- Jamaludin. *Dialektika Teks Suci Agama: Strukturasi Makna Agama dalam Kehidupan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Kartadarmadja, Soenyata M., Kutoyo, Sutrisna (ed.). *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Debdikbud, 1978.
- Kattsoff, Louis O. *Pengantar Filsafat*. Terj. Soejono Soemargono. Yogyakarta: Tiara Wacana Press, 2004.
- Kina “*Pilkada NTB pertaruhan Demokrasi dan Kesejahteraan*” Kompas, 10 Mei 2013.
- Kleden, Ignas. “*Nepotisme, Kronisme, Dinasti*”, Kompas, 31 Oktober 2013.
- Kusumah, Ida Bagus P. W. *NU Lombok 1953-1984*. Narmada: Pustaka Lombok, 2010.

- Kymlicka, Will. *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer*. Ter. Agus Wahyudi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet.I, 2004.
- Latief, Yudi. "Kharakter Bangsa Yang Hilang" Kompas, 7 Mei 2013.
- Lavina, T.Z. *Petualangan Filsafat dari Socrates ke Sarte*. Yogyakarta: Jendela Press, Cet.I, 2002
- Lukman, Lalu. H. *Sejarah, Masyarakat dan Budaya Lombok*, Mataram: Leage Press, 2004.
- Majid, Dien. M. *Berhaji di Masa Kolonial*. Jakarta: CV Sejahtera, 2008.
- Mariani, *Thariqah Hizb Nahdlatul Wathan di Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Lombok Timur 1964-1997*, Skripsi Fakultas Adab Jurusan Sejarah Dan Kebudayaan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Mas'udi, Masdar M. dkk, *Fiqh Korupsi ,Amana vs Kekuasaan*, (Mataram: SOMASI NTB, 2003).
- Mathar, Qasim, Moch. *Sejarah, Teologi dan etika Agama-agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet.I., 2003.
- Michels, Robert *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*. Bhenyamin Hoessein (penerj.). Jakarta: Rajawali, 1984.
- Munawwir, Imam. *Asas-asas Kepemimpinan dalam Islam*. Surabaya: Usaha Nasional Press. tanpa tahun.
- Muliadi, Erlan. *Kontribusi Tuan Guru KH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid Dalam Pembaharuan Pendidikan Islam Di Pulau Lombok pada Tahun 1932-1997*. Tesis Pasca Sarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2012.
- Muhadi, Sugiono. *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, Cet.I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Noer, Deliar. *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. Jakarta: Mizan Pustaka. Cet.I, 1997.

- Nor, Mohammad dkk. *Visi Kebangsaan Religius, Refleksi Pemikiran dan Perjuangan Tuan Guru Kiyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid era 1904-1997*. Jakarta, PT Logos Wacana Ilmu, 2004
- Nugraha, Safri. *Hukum Administrasi Negara*, cet Kesatu edisi revisi Depok:CLGS-FHUI, 2007.
- Nuraksi, Anggawa. H. L. “*Panca Awit Pinajaran Sasak*”, Makalah. Lombok Tengah. 26 Agustus 2013.
- Parimartha, Gde. I. *Perdagangan dan Politik di Nusa Tenggara 1815-1915*. Jakarta: Kerjasama Perwakilan KITLV dan Djambatan anggota IKPAPI, 2002.
- Partanto A, Pius. Al-Barry, M. Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola Press, 1994.
- Patoni, Achmad. *Peran Kiyai Pesantren Dalam Partai Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Patria, Nezar dkk, Antonio Gramsci; *Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Piliang, Yasraf A. *Transpolitika, Dinamika Politik di dalam era Virtualitas*. Yogyakarta: Jalasutra, 2005.
- Poloma, Margareth. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2003
- Purna, Made I. “*Kebijakan Pemerintah untuk Penguatan Jatidiri Dan Pembentukan Karakter Bangsa*”, Makalah Festival Keraton dan Masyarakat Adat Asia Tenggara ke II. Mataram 27 Oktober 2013.
- Rais, Amien. *Suksesi Keajaiban Kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Rinakit, Sukardi “Analisa Politik”, dalam *Kompas*, 12 November 2013.
- Roswantoro, Alim. *Pengantar Singkat Filsafat Sosial*. Yogyakarta: Kedaf press, Cet.I, 2008.

- Rozi, Syafuan dkk. *Kekerasan Komunal, Anatomi dan Resolusi konflik di Indonesia*. Jakarta, Pustaka Pelajar dan Pusat Penelitian Politik-LIPI, 2006.
- Russel, Bertand *Sejarah Filsafat Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Sarjono. *Politik Tuan Guru Bajang. Fajar Kebangkitan Demokrasi di Lombok*. Malang: Enzal Press. 2012.
- Schmandt, Henry J. *Filsafat Politik. Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar press. Cet 1, 2002.
- Setyaningsih, A. *Lelaki Pepadu*. Tesis Pasca Sarjana program Antropologi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 2009.
- Sihotang, Kasdin. *Filsafat Manusia*. Yogyakarta:Kanisius Press. 2009.
- Simon R. *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Sinambela, Poltak, Lijan. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara 2006.
- Siswanta. *Etika Kekuasaan menurut Antonio Gramsci*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin Studi Agama dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Ritzer, George *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet.IV . 2003.
- Soebandi, Ketut, Gde. J.M. *Babad Warga Brahmana Pandita Sakti Wawu Rawuh; Asal usul peninggalan dan keturunan Dang Hyang Nirartha*. Jakarta: Pustaka Manikgni, 1998.
- Soekanto, S. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.
- Soemarman, *Hukum Adat, Perspektif Sekarang dan Mendatang*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa Press, 2003.
- Stoddard, L. *Dunia Baru Islam*, Muljadi Djojomartono (Terj.). Jakarta: Panitia Penerbit, 1966.
- Straus, Leo.,*Politic philosophi and history*. Jurnal of the histori of ideas, 1949.

- Sukmana, Iskandar. “*PilKaDa 2010 Di Lombok Tengah; Kemabalinya para pewaris Tahta*”. Yogyakarta, Makalah, 2011.
- Sulkhad, Kaharudin. *Merarik pada masyarakat Sasak; Sejarah, proses dan pandangan Islam*. Ombak Press. Yogyakarta, 2013.
- Suseno, M. Franz. *Etika Politik, Prinsip – prinsip Moral Dasar Kenegaraan*. Jakarta: Gramedia Press, 1994.
- _____. *Berfilsafat dari konteks*. Jakarta: Gramedia Press, 1991.
- _____. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- _____. *Kuasa dan Moral*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Cet 1, 1986.
- _____. *Ringkasan Sejarah Marxisme dan Komunisme*. Jakarta: t.p., 1977.
- Sukri, M. *Identitas Sasak; Redefinisi Komunitas yang Terbayang*. Tesis Pasca Sarjana Program Antropologi UGM Yogyakarta, 2004
- Surbakti, Ramlan *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1999.
- Syafii, Inu K. *Filsafat Politik*. Bandung: CV. Mandar Maju Press. Cet.I., 2005.
- _____. *Al-Qur'a dan Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996
- _____. *Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Syakur, Abd. A. *Islam dan Kebudayaan; Akulturasi Nilai-nilai Islam Dalam Budaya Sasak*,. Yogyakarta: Adab Press, 2006.
- Syarif, Chumaidi R. *Kekerasan di Kerajaan Surgawi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003.
- Tafsir, Dr. Ahmad. *Filsafat Umum; Akal dan Hati Sejak Thales sampai Capra*, (ed). Tjun Surjaman. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet.I. 1990.
- Tamtiari, W. *Awig-awig Melindungi Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga?*, Yogyakarta: Kerja sama dengan Foud Foundation dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, 2005.

Thoha, Miftah. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet.I 2005.

Treanor, Paul. *Kebohongan Demokrasi*. Yogyakarta: ISTAWA. Cet.I., 2001.

Usman, *Filsafat Pendidikan: Kajian Filosofis Pendidikan Nahdlatul Wathan di Lombok*. Yogyakarta: Teras, 2010.

Van Deer Kraan, Alfons. *Lombok; Penaklukan, Penjajahan dan keterbelakangan 1870-1940*, Terj. M. Donny S. Mataram: Lenge Press, 2009.

Weber, Max *Etika Protestan Dan Spirit Kapitalisme*, Anthony Giddens (pengantar). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.I. 2006.

Winters, Jeffrey. *Oligarki*. Jakarta:Gramedia, 2011

Zadzir, Muhammad. *Metode Penelitian I*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Zainudin, Rahman. A. *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Kaldun*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992

Zakaria, Rahman, Fathur. *Mozaik Budaya Mataram*. Mataram: Yayasan Sumurmas Al-Hamidy, 1998.

Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.